

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Edisi Keempat, Jakarta

I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007);

Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013;

Karya Ilmiah:

Frenki, *Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum;

Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990;

Muhammad Ramadhana Alfaris, *Payung Hukum Penyandang Disabilitas dalam Konteks Dukungan dan Aksesibilitas terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1/Nomor 2/ Desember 2018;

Sugi Rahayu, Utama Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: 2013;

Syufa'at, *Demokrasi Ekonomi di Indonesia Era Reformasi*, Purwokerto: 2014, Dosen Jurusan Syariah STAIN Purwokerto;

Dwiky Elfauzy, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Tuna Netra terhadap Pelayanan Jasa Perbankan* dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Bandung, Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017;

Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) dengan Asas Keadilan (Substansial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010;

R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016;

Ida Bagus Gede Geni Wastu, *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit dibawah Tangan pada Bank Perkreditan Rakyat*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana 2016-2017

Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;

POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Artikel dan Berita Online:

Erna Ratnaningsih, Kewajiban Negara dan Hak Penyandang Disabilitas, ([https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/04/29/Kewajiban-Negara-Dan-Hak-Penyandang Disabilitas/](https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/04/29/Kewajiban-Negara-Dan-Hak-Penyandang-Disabilitas/)),

Zulkarnain Ridwan, 2015, Fiat Justisia, Vol.7 Nomor 2, (https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?HI=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Kewajiban+Penyandang+Disabilitas&Oq=Kewajiban+Penyandang+Disab#D=G_s_Qabs&U=%23p%3dqx_Kiv1gkbqj),